

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM MENDUKUNG *E-GOVERNMENT* PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BADUNG

Made Wijaya Kumara Dwikananda¹, Ni Putu Anik Prabawati²

dwikanandakumara@gmail.com¹, prabawati@unud.ac.id²

Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung upaya reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi. Proses analisis data dilaksanakan secara bertahap, meliputi pemilihan data, penyajian data secara deskriptif, serta penarikan simpulan. Analisis penelitian difokuskan pada lima indikator keberhasilan program, yaitu tingkat pemahaman, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, dan perubahan nyata yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap fungsi, tujuan, dan manfaat SIMPEG, sehingga mendukung proses implementasi sistem. Penerapan SIMPEG juga dinilai telah sesuai dengan sasaran dan kebutuhan organisasi, serta mampu mempercepat proses administrasi kepegawaian. Selain itu, SIMPEG berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kepegawaian. Dampak nyata dari penerapan SIMPEG terlihat pada perubahan pola kerja yang lebih sistematis, peningkatan kualitas layanan kepegawaian, serta perbaikan tata kelola birokrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIMPEG memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, meskipun masih diperlukan upaya penguatan berkelanjutan untuk optimalisasi pemanfaatannya.

Kata Kunci: SIMPEG, Reformasi Birokrasi, *E-Government*, Manajemen Kepegawaian, Administrasi Publik.

ABSTRACT

This research investigates the implementation of the Personnel Management Information System (SIMPEG) as a strategic instrument in advancing bureaucratic reform within governmental organizations. A descriptive qualitative design was adopted, with data gathered through in-depth interviews, direct observation, and systematic document analysis. The data were analyzed through sequential procedures consisting of data selection, analytical description, and interpretative conclusion development. The assessment was based on five key indicators of program effectiveness: user comprehension, appropriateness of targeting, timeliness of implementation, attainment of program objectives, and observable institutional changes. The findings reveal that most employees demonstrate an adequate understanding of the operational functions, objectives, and advantages of SIMPEG, which positively influences its implementation. The system has been applied in alignment with organizational needs and has proven effective in streamlining personnel administrative processes. Moreover, SIMPEG enhances efficiency, transparency, and accountability in human resource governance. Observable outcomes include more structured work mechanisms, improved quality of personnel services, and strengthened bureaucratic management practices. In conclusion, SIMPEG serves a crucial role in supporting bureaucratic reform initiatives; however, sustained institutional reinforcement is necessary to maximize its long-term effectiveness.

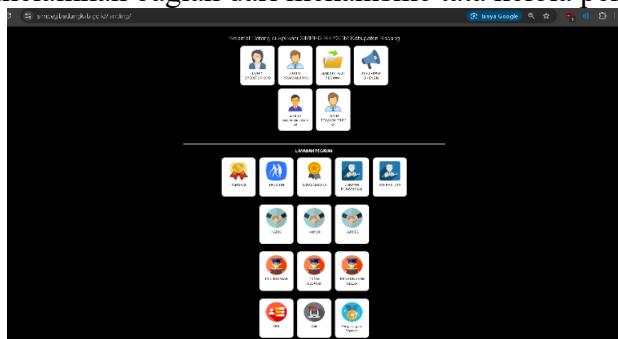
Keywords: SIMPEG, Bureaucratic Reform, *E-Government*, Human Resource Management, Public Administration.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipahami hanya sebagai proses digitalisasi kegiatan administratif, tetapi merupakan upaya sistematis dalam membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan teknologi sebagai instrumen pendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, pengembangan e-Government mulai diperkuat sejak awal tahun 2000-an melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 sebagai fondasi awal pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut kemudian diperjelas melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana strategis dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Transformasi digital pemerintahan menjadi agenda strategis global dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi sektor publik dipandang sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat akuntabilitas birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi *e-Government* tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan berbasis elektronik, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya aparatur secara sistematis dan berbasis data. Dalam konteks ini, sistem informasi menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan berorientasi pada kinerja. Menurut Prakoso dan Dewi (2021), keberhasilan *e-Government* sangat ditentukan oleh kesiapan sistem pendukung internal, termasuk sistem pengelolaan kepegawaian.

Konsep *good governance* menempatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem informasi berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang objektif dan terintegrasi. Dalam manajemen sektor publik, kualitas keputusan sangat bergantung pada akurasi dan keterpaduan data yang dikelola oleh organisasi pemerintahan. Menurut Santoso dan Rahayu (2022), pemanfaatan sistem informasi kepegawaian mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi bukan sekadar alat teknis, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola pemerintahan modern.



Gambar 1. Beranda Website SIMPEG BADUNG

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu sistem strategis yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data aparatur sipil negara secara terintegrasi. SIMPEG mencakup pengelolaan data personal, kepangkatan, pendidikan, mutasi, hingga pengembangan kompetensi pegawai. Menurut Yuliana dan Hartono (2021), SIMPEG berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui penyediaan informasi kepegawaian yang sistematis dan terstruktur. Keberadaan SIMPEG memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola sumber daya manusia

secara lebih profesional dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, SIMPEG dipandang sebagai elemen penting dalam ekosistem *e-Government*.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG di instansi pemerintah daerah telah memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi administrasi kepegawaian. Studi Putri dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa SIMPEG mampu mempercepat proses layanan kepegawaian dan mengurangi ketergantungan pada administrasi manual. Namun demikian, efektivitas implementasi SIMPEG sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen organisasi. Menurut Rahman dan Suryani (2022), keterbatasan sumber daya dan kompetensi pengguna menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi SIMPEG. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh aspek organisasi.

Dalam konteks kelembagaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran strategis sebagai pengelola manajemen dan pengembangan aparatur daerah. BKPSDM Kabupaten Badung bertanggung jawab dalam pengelolaan data ASN, perencanaan kebutuhan pegawai, serta pengembangan kompetensi aparatur. Menurut Amir dan Kurniawan (2022), BKPSDM menjadi aktor kunci dalam memastikan sistem informasi kepegawaian berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan *e-Government* daerah. Dengan demikian, kualitas implementasi SIMPEG di BKPSDM berimplikasi langsung terhadap kinerja birokrasi daerah.

Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang aktif mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian. Penelitian Sariasiyah dan Wijaya (2025) menunjukkan bahwa SIMPEG di Kabupaten Badung telah berkontribusi dalam transformasi digital proses mutasi pegawai. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kebijakan mutasi dan belum mengkaji secara komprehensif implementasi SIMPEG dalam mendukung *e-Government* secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan adanya ruang kajian lanjutan yang lebih mendalam pada tingkat kelembagaan BKPSDM.

Sejumlah penelitian lain mengungkapkan adanya kesenjangan antara tujuan implementasi SIMPEG dan pemanfaatannya di lapangan. Studi Ramadhan dan Putra (2024) menemukan bahwa SIMPEG belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan strategis, melainkan masih berfokus pada fungsi administratif. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nasution dan Lubis (2023) yang menyoroti lemahnya integrasi SIMPEG dengan sistem informasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi SIMPEG dalam mendukung *e-Government* masih menghadapi berbagai tantangan implementatif.

Perdebatan dalam literatur juga muncul terkait efektivitas SIMPEG dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Maulana dan Pratiwi (2025) menemukan bahwa SIMPEG berpengaruh positif terhadap efektivitas administrasi kepegawaian, namun dampaknya sangat bergantung pada tingkat pemanfaatan sistem oleh pengguna. Sebaliknya, Halim dan Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, seperti masa krisis, sistem informasi kepegawaian belum mampu sepenuhnya menggantikan proses manual. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya analisis kontekstual yang mempertimbangkan kondisi organisasi dan lingkungan implementasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung *e-Government* pada BKPSDM Kabupaten Badung. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana SIMPEG telah dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen tata kelola kepegawaian berbasis digital. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian *e-Government* serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aparatur. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung e-Government pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali proses, pengalaman, serta persepsi aparatur sipil negara sebagai pengguna sistem secara kontekstual sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di BKPSDM Kabupaten Badung dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur daerah.

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari ASN pengguna SIMPEG yang terlibat langsung dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian, sedangkan data pendukung diperoleh dari dokumen kebijakan, pedoman teknis, dan arsip administrasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan SIMPEG, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap pengembangan e-Government. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penggunaan SIMPEG dalam kegiatan administrasi kepegawaian, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara melalui tahapan pengolahan data yang berlangsung secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif agar mudah dipahami. Tahap akhir analisis dilakukan melalui penafsiran dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dengan indikator efektivitas implementasi sistem informasi dan prinsip e-Government. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kabupaten Badung dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui pengelolaan data aparatur sipil negara secara terintegrasi, SIMPEG digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung sebagai sarana utama dalam mendukung administrasi kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan efisien. Penerapan sistem ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data kepegawaian yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan keterlambatan serta ketidaksesuaian data. Dengan demikian, SIMPEG berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai fondasi penguatan tata kelola kepegawaian daerah yang sejalan dengan prinsip e-Government (Sariash & Wijaya, 2025).

BKPSDM Kabupaten Badung berperan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk perencanaan, pengembangan, dan pelayanan administrasi kepegawaian. Dalam menjalankan fungsi tersebut, SIMPEG

dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan kepegawaian, seperti pengelolaan data pegawai, administrasi cuti, serta pembaruan informasi kepegawaian secara berkala. Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan SIMPEG telah menjadi bagian dari proses kerja rutin aparatur, sehingga membantu mempercepat alur pelayanan dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG telah terintegrasi dengan aktivitas kelembagaan BKPSDM dan mendukung pelaksanaan e-Government di tingkat daerah (Wijaya & Sariyah, 2025).

Untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Badung, penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Sutrisno dengan lima indikator utama, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, dan perubahan nyata. Kerangka analisis ini digunakan untuk mengevaluasi implementasi SIMPEG tidak hanya dari sisi teknis sistem, tetapi juga dari perspektif pengguna dan dampaknya terhadap kinerja administrasi kepegawaian. Melalui pendekatan ini, efektivitas SIMPEG dapat dianalisis secara lebih komprehensif dalam mendukung penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Badung (Maulida et al., 2023).

1. Pemahaman Program

Pemahaman program dalam penelitian ini dimaknai sebagai sejauh mana aparatur sipil negara mampu mengenali fungsi, tujuan, serta manfaat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam menunjang pelaksanaan tugas kepegawaian. Pemahaman pengguna menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan dan kelancaran penggunaan sistem dalam aktivitas kerja sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN pengguna SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Badung pada umumnya telah memahami fungsi dasar sistem, khususnya dalam pengelolaan data kepegawaian dan administrasi rutin. Pemahaman tersebut diperoleh melalui pengalaman penggunaan serta dukungan sosialisasi yang diberikan oleh instansi terkait. Meskipun demikian, pada tahap awal penerapan masih ditemukan perbedaan tingkat pemahaman antar pengguna, terutama bagi ASN yang belum terbiasa dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman program telah terbentuk secara cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan melalui pendampingan berkelanjutan. (Ismail et al., 2024).

2. Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran dalam konteks penelitian ini merujuk pada kesesuaian antara penerapan SIMPEG dengan kelompok pengguna serta kebutuhan organisasi dalam pengelolaan kepegawaian. SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Badung digunakan oleh ASN yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses administrasi kepegawaian, sehingga sistem ini diterapkan pada sasaran yang relevan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa fitur-fitur SIMPEG telah disesuaikan dengan kebutuhan kerja pengguna, seperti pengelolaan data pegawai, cuti, dan pembaruan informasi kepegawaian. Dari sisi pengaturan akses, pembagian peran pengguna dalam sistem juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban data. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG telah diarahkan pada sasaran yang tepat dan mampu menjawab permasalahan administrasi kepegawaian yang sebelumnya dilakukan secara manual. (Ismail et al., 2024).

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan SIMPEG dalam mendukung percepatan proses administrasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan layanan. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Badung mampu mempercepat proses pengajuan dan pengolahan administrasi kepegawaian dibandingkan dengan sistem manual. ASN pengguna menyampaikan bahwa akses

informasi dan pemrosesan data menjadi lebih cepat karena dilakukan secara daring dan terintegrasi. Meskipun demikian, kendala teknis seperti gangguan sistem atau keterlambatan akses masih terjadi dalam situasi tertentu. Namun, kendala tersebut bersifat insidental dan tidak menghambat proses kerja secara signifikan. Dengan demikian, dari aspek ketepatan waktu, SIMPEG dinilai cukup efektif dalam mendukung pelayanan kepegawaian.

4. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan berkaitan dengan sejauh mana penerapan SIMPEG mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMPEG telah membantu BKPSDM Kabupaten Badung dalam menyatukan data kepegawaian ke dalam satu sistem yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Penggunaan sistem ini juga mengurangi potensi kesalahan administrasi serta mempercepat proses pelayanan. Selain itu, SIMPEG memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama penerapan SIMPEG telah tercapai secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Temuan ini sejalan dengan tujuan *e-Government* yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Sariash & Wijaya, 2025).

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dalam penelitian ini merujuk pada dampak yang dirasakan setelah penerapan SIMPEG, baik dari sisi proses kerja maupun perilaku pengguna. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola kerja aparatur, terutama berkurangnya ketergantungan pada dokumen fisik dan meningkatnya pemanfaatan sistem digital. ASN menjadi lebih mandiri dalam memperbarui data kepegawaian dan memantau proses administrasi melalui SIMPEG. Selain meningkatkan efisiensi kerja, perubahan ini juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih tertib dan berbasis teknologi. Dengan demikian, penerapan SIMPEG di BKPSDM Kabupaten Badung telah memberikan perubahan nyata yang mendukung penguatan *e-Government* daerah.

Upaya dukungan *e-Government* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung

Menurut Budi Rianto dkk. sebagaimana dikemukakan dalam Sariash dan Wijaya (2025), *e-Government* merujuk pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan tata kelola organisasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pengelolaan pemerintahan, serta transparansi administrasi publik. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat empat indikator keberhasilan *e-Government* yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kontribusi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung pelaksanaan *e-Government* di lingkungan pemerintahan daerah.

1. Ketersediaan Data dan Informasi pada Pusat Data BKPSDM

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung telah mendukung terwujudnya pengelolaan data kepegawaian yang terpusat dan terintegrasi. Sistem ini menyajikan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan aparatur sipil negara, meliputi data identitas pegawai, kepangkatan, riwayat kenaikan pangkat, data pensiun, serta informasi jabatan struktural dan fungsional. Keberadaan pusat data kepegawaian tersebut memudahkan proses pengelolaan dan penelusuran informasi secara lebih sistematis.

Ketersediaan data dalam SIMPEG juga diperkuat melalui penerapan mekanisme pengamanan sistem yang memadai, seperti autentikasi pengguna dan pengaturan hak akses berdasarkan tingkat kewenangan. Pengaturan ini memastikan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang memiliki otoritas, seperti administrator kepegawaian dan pengelola peta jabatan, yang dapat mengakses data sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pengelolaan akses yang terkontrol, keamanan dan integritas data kepegawaian dapat terjaga, sekaligus menjamin ketersediaan informasi yang dapat diakses secara cepat dan berkelanjutan. Kondisi ini memberikan dukungan nyata terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.

2. Ketersediaan Data dan Informasi bagi Kebutuhan Promosi Daerah

Dalam konteks pengelolaan kepegawaian, SIMPEG di BKPSDM belum dimanfaatkan secara langsung sebagai sarana promosi daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi strategis yang cukup besar, khususnya sebagai representasi keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Hal tersebut tercermin dari adanya ketertarikan sejumlah pemerintah daerah lain untuk mempelajari dan mereplikasi penerapan SIMPEG sebagai sistem pengelolaan kepegawaian berbasis digital.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa SIMPEG memiliki kualitas sistem dan tata kelola data yang baik sehingga layak dikembangkan sebagai salah satu aset digital daerah. Selain itu, keberhasilan Provinsi Bali dalam memperoleh penghargaan *Digital Government Award* pada ajang SPBE Summit 2024 mencerminkan bahwa pengelolaan data dan informasi kepegawaian melalui sistem digital, termasuk SIMPEG, turut berkontribusi dalam membangun citra positif daerah dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Kinerja pengelolaan kepegawaian yang didukung oleh SIMPEG menjadi bagian dari portofolio transformasi digital yang memperkuat posisi daerah sebagai wilayah yang adaptif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan.

3. Ketersediaan Aplikasi *E-Government* Pendukung Pekerjaan Kantor dan Pelayanan Publik

SIMPEG yang diterapkan pada BKPSDM Provinsi Bali telah berperan sebagai aplikasi e-Government yang mendukung secara efektif pelaksanaan administrasi perkantoran dan layanan kepegawaian. Melalui sistem ini, berbagai dokumen kepegawaian dapat dihasilkan secara otomatis, termasuk surat keputusan dan dokumen administratif lainnya yang dibutuhkan dalam proses pelayanan kepegawaian. Selain itu, SIMPEG memfasilitasi pengelolaan layanan kepegawaian secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga dapat mengurangi waktu penyelesaian layanan serta meminimalkan kesalahan administratif. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, baik bagi pegawai sebagai pengguna layanan maupun bagi organisasi secara keseluruhan.

4. Ketersediaan Aplikasi Dialog Publik

Berdasarkan hasil penelitian, indikator ketersediaan aplikasi dialog publik pada SIMPEG di BKPSDM Provinsi Bali belum sepenuhnya terpenuhi. Fitur komunikasi dua arah, seperti pengaduan atau penyampaian umpan balik, belum terintegrasi secara optimal dalam sistem SIMPEG. Apabila terjadi kendala atau permasalahan dalam penggunaan sistem, koordinasi dan penyelesaian masalah masih dilakukan melalui media komunikasi di luar SIMPEG, seperti aplikasi pesan instan WhatsApp. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keterbukaan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan *e-Government* belum terealisasi secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya regulasi maupun laporan khusus yang secara eksplisit mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan SIMPEG turut

memengaruhi kredibilitas penerapan prinsip *e-Government* dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan BKPSDM.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi tujuan pendidikan Islam di era globalisasi karena kemajuan pesat dalam teknologi, masyarakat, dan budaya. Paradigma tradisional yang hanya berfokus pada aspek moral dan spiritual tanpa mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan modern tidak sesuai dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus meningkatkan relevansinya melalui tujuan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai Islam transendental dengan persyaratan kompetensi abad ke-21 dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan dinamika budaya global.

Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa kerangka filosofis dengan komponen ontologis, epistemologis, dan aksiologis harus menjadi dasar untuk merekonstruksi tujuan pendidikan Islam. Dari sudut pandang ontologis, pendidikan Islam harus menekankan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan setia yang mampu menghadapi permasalahan dunia. Dari sudut pandang epistemologis, pendidikan Islam harus mendorong integrasi informasi yang tidak lagi membedakan antara pengetahuan agama dan pengetahuan kontemporer. Sementara itu, dari sudut pandang aksiologis, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam dunia yang semakin canggih dan digital.

Studi ini juga menunjukkan bahwa, berkat teknologi digital, transparansi informasi, dan akses ke literatur serta jaringan akademik internasional, globalisasi menghadirkan prospek yang substansial untuk kemajuan pendidikan Islam. Peluang ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan, memperluas perspektif ilmiah, dan membuat siswa Muslim lebih kompetitif di skala global. Oleh karena itu, mendefinisikan kembali tujuan pendidikan Islam bukanlah sekadar reaksi terhadap zaman, tetapi juga upaya yang terencana untuk menghasilkan generasi Muslim yang kompetitif, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, H., & Kurniawan, D. (2022). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di BKPSDM Dinas Pendidikan Kota Makassar. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(3), 77–88.
- Halim, A., & Nurhayati, S. (2021). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian pada pemerintah daerah di masa COVID-19. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 5(2), 89–98.
- Ismail, A., Anggoro, M. Y. A. R., & Daweng, M. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dinas Pendidikan. *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)*, 1(4), 1031–1038.
- Maulana, R., & Pratiwi, E. (2025). Efektivitas e-government dan SIMPEG terhadap administrasi kepegawaian di Kota Batam. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 7(1), 25–38.
- Maulida, W., Rudiana, R., & Sutisna, J. (2023). Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (janitra)*, 3(1), 117–129.
- Nasution, A., & Lubis, M. (2023). Analisis implementasi kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian pada Sekretariat DPRD. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 134–145.
- Prakoso, A., & Dewi, M. (2021). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian untuk

- mendukung e-government. *JPAP (Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran)*, 9(2), 180–191.
- Putri, D. A., & Wibowo, A. (2020). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 8(4), 301–312.
- Rahman, F., & Suryani, D. (2022). Implementasi aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dilihat dari aspek sumber daya di BKPSDM Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 3(1), 55–67.
- Ramadhan, A., & Putra, I. M. (2024). Analisis implementasi aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) untuk mendukung e-government pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 210–222.
- Salsabillah, N. M. H., & Mursyidah, L. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 3(2), 15–15.
- Santoso, B., & Rahayu, T. (2022). Analisis implementasi sistem informasi kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 6(1), 60–71.
- Sariasih, K. Y., & Wijaya, K. A. S. (2025). Strengthening e-government through SIMPEG: Digital transformation of civil servant mutation in Badung Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(1), 1–15.
- Wijaya, K. A. S., & Sariasih, K. Y. (2025). Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung e-government pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 45–58.
- Yuliana, E., & Hartono, D. (2021). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. *Akuntansi* 45, 3(2), 145–154.